

ABSTRAK

Satwa liar merupakan seluruh hewan yang hidup di darat, air, maupun udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas di alam maupun yang dipelihara oleh manusia. Terhadap jenis satwa tertentu yang populasinya terbatas dan terancam keberadaannya, negara memberikan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Salah satu pembaruan penting dalam undang-undang tersebut adalah ditetapkan pidana minimum khusus sebagai upaya memperkuat perlindungan satwa yang dilindungi, supaya tidak terjadi disparitas pemidanaan, serta mencegah terjadinya kejahatan serupa. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2025/PN Bit terhadap ketentuan Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang dianalisis secara preskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, dan mengangkut satwa yang dilindungi serta bagian-bagiannya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf d dan huruf f jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Meskipun seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, yang berada di bawah ketentuan pidana minimum khusus, yaitu 3 (tiga) tahun. Pertimbangan hakim yang mendasarkan keringanan pidana pada alasan bahwa barang bukti diperoleh sebagai oleh-oleh atau kenang-kenangan tidak cukup untuk mengesampingkan kebijakan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam putusan tersebut dinilai belum tepat karena tidak sejalan dengan ketentuan pidana minimum khusus, tujuan pemidanaan, prinsip kepastian hukum, serta kebijakan perlindungan satwa yang dilindungi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Kata Kunci: Satwa Liar Dilindungi, Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana Konservasi, Disparitas, Pemidanaan.

ABSTRACT

Wildlife refers to all animals living on land, in water, or in the air that retain their wild nature, whether living freely in their natural habitats or kept by humans. For certain wildlife species whose populations are limited and threatened with extinction, the state provides legal protection through Law Number 32 of 2024 concerning Amendments to Law Number 5 of 1990 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. One of the significant reforms introduced by this law is the establishment of a special minimum sentence as an effort to strengthen the protection of protected wildlife, prevent sentencing disparities, and deter the commission of similar offenses. Nevertheless, judicial practice continues to reveal court decisions imposing sentences below the special minimum threshold prescribed by law.

This study aims to analyze the appropriateness of the criminal sanction imposed by the court in Decision Number 40/Pid.Sus-LH/2025/PN Bit in relation to Article 40A paragraph (1) of Law Number 32 of 2024. This research employs a normative legal research method using both a statutory approach and a case approach. The analysis is conducted prescriptively based on statutory regulations and court decisions.

The findings indicate that the Defendant was lawfully and convincingly proven to have committed the criminal offense of storing, possessing, and transporting protected wildlife and their body parts without authorization, as stipulated in Article 40A paragraph (1) letters d and f in conjunction with Article 21 paragraph (2) letters a and c of Law Number 32 of 2024. Although all elements of the offense were fulfilled and no justifying or excusing grounds were found, the court imposed a sentence of 1 (one) year and 10 (ten) months of imprisonment, which falls below the special minimum sentence of 3 (three) years prescribed by law. The court's consideration in reducing the sentence, based on the argument that the evidence had been obtained as souvenirs or mementos, was insufficient to override the sentencing policy established by the legislature. Therefore, the sentence imposed in the decision is considered inappropriate because it is inconsistent with the provisions on special minimum sentencing, the objectives of punishment, the principle of legal certainty, and the policy of protecting protected wildlife as mandated by Law Number 32 of 2024.

Keywords: *Protected Wildlife Species, Statutory Minimum Sentence, Conservation Crime, Disparity, Punishment.*